



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 127) yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 100 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 100);
- b. Nomor 152 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 152);
- c. Nomor 183 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 183);
- d. Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 65);

- e. Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 63);
- f. Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 55);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 13

PERUBAHAN KETUJUH HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a. Sekretaris Daerah	1						
	b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1						
	c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1						
	d. Asisten Administrasi Umum	1						
	e. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1						
	f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1						
	g. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1						
	a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama		1					
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					2		
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					2		
	3) JF Arsiparis Penyelia					1		
	4) Penelaah Teknis Kebijakan				4			
	5) Pengolah Data dan Informasi				7			
	6) Pengadministrasi Perkantoran				4			
	b. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitas Pertanian		1					
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					2		
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1		
	3) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1		
	4) JF Pranata Komputer Mahir					1		
	5) JF Pranata Komputer Terampil					1		
	6) JF Arsiparis Terampil					1		
	7) Penelaah Teknis Kebijakan				4			
	8) Pranata Kewilayahan				6			
	9) Penata Layanan Operasional				2			
	10) Pengolah Data dan Informasi				3			
	11) Pengadministrasi Perkantoran				10			
	c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		1					
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					2		
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1		
	3) JF Pranatan Komputer Penyelia					1		
	4) Penelaah Teknis Kebijakan				6			

1	2	3	4	5	6	7	8
	5) Penata Layanan Operasional				5		
	6) Pengolah Data dan Informasi				1		
	7) Pengadministrasi Perkantoran				9		
	d. Kepala Bagian Hukum		1				
	1) JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda					2	
	2) JF Penyuluh Hukum Ahli Muda					8	
	3) JF Analis Hukum Ahli Muda					1	
	4) JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama					2	
	5) JF Penyuluh Hukum Ahli Pertama					15	
	6) JF Arsiparis Terampil					1	
	7) Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan				1		
	8) Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan				1		
	9) Pengolah Data dan Informasi				2		
	10) Pengelola Layanan Operasional				2		
	11) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		1				
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					3	
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					2	
	3) JF Arsiparis Mahir					1	
	4) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	5) Penata Layanan Operasional				2		
	6) Pengolah Data dan Informasi				2		
	7) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		1				
	1) JF Perencana Ahli Muda					3	
	2) JF Perencana Ahli Pertama					1	
	3) JF Arsiparis Penyelia					1	
	4) Penelaah Teknis Kebijakan				6		
	5) Penata Layanan Operasional				1		
	6) Pengolah Data dan Informasi				4		
	7) Pengelola Layanan Operasional				2		
	8) Pengadministrasi Perkantoran				8		
	g. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		1				
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					2	
	2) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda					10	
	3) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	4) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	5) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama					21	
	6) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	7) Penelaah Teknis Kebijakan				28		
	8) Penata Layanan Operasional				2		
	9) Pengolah Data dan Informasi				4		
	10) Pengadministrasi Perkantoran				4		

1	2	3	4	5	6	7	8
	h. Kepala Bagian Umum						
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda		1			1	
	2) JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda					1	
	3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					1	
	4) JF Arsiparis Ahli Muda					3	
	5) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	6) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	7) JF Pranata SDM Aparatur Penyelia					1	
	8) JF Pranata SDM Aparatur Mahir					1	
	9) JF Arsiparis Mahir					1	
	10) JF Pranata SDM Aparatur Terampil					1	
	11) Penelaah Teknis Kebijakan				15		
	12) Penata Layanan Operasional				10		
	13) Pengolah Data dan Informasi				3		
	14) Pengelola Layanan Operasional				3		
	15) Pengadministrasi Perkantoran				14		
	16) Operator Layanan Operasional				10		
	17) Pengelola Umum Operasional				3		
	i. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1				
	1) Kasubbag Protokol			1			
	1) Penata Keprotokolan				6		
	2) Pengelola Keprotokolan				1		
	3) Pengelola Layanan Operasional				1		
	4) Pengadministrasi Perkantoran				11		
	2) Kasubbag Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	2) Penata Layanan Operasional				2		
	3) Pengolah Data dan Informasi				1		
	4) Pengadministrasi Perkantoran				8		
	j. Kepala Bagian Organisasi		1				
	1) JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda					2	
	2) JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama					1	
	3) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					5	
	4) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	5) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	6) Penelaah Teknis Kebijakan				9		
	7) Penata Layanan Operasional				3		
	8) Pengolah Data dan Informasi				6		
	9) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	k. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya		1				
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Madya					12	
	2) JF Arsiparis Ahli Madya					2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) JF Perencana Ahli Madya					1	
	4) JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya					1	
	5) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya					2	
	Jumlah	7	11	2	251	132	
	Jumlah Total			403			

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Sekda	Sekda	
2	Asisten 3		
3	Bendah	Kabang	af